

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan beberapa kajian terdahulu dalam bentuk jurnal dan artikel ilmiah yang mengangkat topik yang relevan dengan penelitian ini, untuk tujuan sebagai bahan bacaan dan referensi, antara lain :

Penelitian terdahulu pertama yang akan penulis pakai sebagai referensi ialah tulisan Mumin Ahmad Khan yang berjudul *The Conflict of Azerbaijan And Armenia With Special Reference to Nagorno-Karabakh: An Overview*.¹ Dalam penelitian ini, Mumin Ahmad Khan menulis mengenai sejarah dan latar belakang mengenai perang yang terjadi antara Armenia dengan Azerbaijan khususnya mengenai perebutan wilayah Nagorno-Karabakh. Selain itu, dalam tulisan ini, Mumin Ahmad Khan juga menyoroti berbagai keterlibatan negara asing seperti Rusia, Turki dan juga Iran dalam konflik. Keterlibatan negara asing dalam konflik menurut jurnal tersebut dilandasi oleh berbagai faktor, namun yang terutama ialah faktor perebutan pengaruh di kawasan regional antara Turki dengan Rusia.

Penelitian selanjutnya yaitu , *Exploring Turkey's Strategic Goals in Caucasus Region During the 2020 Nagorno-Karabakh Crisis* yang ditulis oleh

¹ Mumin Ahmad Khan, *The Conflict of Azerbaijan And Armenia With Special Reference to Nagorno-Karabakh : An Overview*, Journal of Malay Islamic Studies, Vol. 04, No.01,(June 2021).

Shabnam Dadparvar dan Saeed Azizi.² Penelitian ini, ditelaah tujuan strategis Turki di kawasan Kaukasus Selatan berdasarkan krisis Nagorno-Karabakh 2020 baru baru ini dengan mengadopsi pendekatan Realisme.

Menurut aliran ini, Negara-negara mengejar lebih banyak kepentingan, berusaha mendapatkan lebih banyak kekuatan untuk mengamankan kedaulatan mereka. Inilah esensi Realisme yang membenarkan penggunaan kekuatan ekonomi dan militer untuk mencapai tujuan negara. Anarki Hubungan internasional dan perjuangan untuk eksistensi berkaitan dengan prioritas geopolitik dan keamanan negara, semuanya mengarah pada negara-negara yang mengejar kekuasaan dan keamanan baik secara regional maupun internasional.

Wilayah Kaukasus selatan, yang memperoleh signifikansi strategis dan geopolitik setelah runtuhnya Uni Soviet terutama karena sumber daya energi yang besar, telah menyebabkan persaingan yang cukup sengit di antara negara-negara untuk memiliki akses ke sumber daya energi dan untuk berkembang secara geopolitik. Sejak runtuhnya Uni Soviet, Turki selalu berusaha mengembangkan hubungan dekat dengan Kaukasus Selatan.

Penelitian ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Jodi Misyendi yang berjudul *Analisis Peran Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) Dalam Mediasi Konflik Nagorno-Karabakh Antara Armenia Dengan*

² Shabnam Dadparvar dan Saeed Azizi, *Exploring Turkey's Strategic Goals in Caucasus Region During the 2020 Nagorno-Karabakh Crisis*, International Relations and Diplomacy, Vol. 8, No. 11,(November 2020).

Azerbaijan.³ Penelitian ini membahas peran organisasi untuk keamanan dan kerjasama di Eropa atau Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) dalam menengahi konflik Nagorno-Karabakh antara Armenia dan Azerbaijan.

Konflik Nagorno-Karabakh adalah konflik teritorial yang melibatkan Azerbaijan yang menganut prinsip integritas teritorial di Nagorno-Karabakh dan Armenia yang mendukung kemerdekaan Nagorno-Karabakh dan etnis Armenia atas Azerbaijan. Inti dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran OSCE dalam Konflik Nagorno-Karabakh dan faktor - faktor yang mempengaruhi kegagalan OSCE mediasi dalam resolusi konflik Nagorno-Karabakh antara Armenia dan Azerbaijan.

Dalam pembahasannya, penelitian ini menggunakan teori Jacob Bercovitch tentang mempengaruhi perilaku mediasi di konflik internasional sebagai alat analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mediasi OSCE melalui perwakilannya OSCE Minsk Group, telah gagal dalam menyelesaikan konflik Nagorno-Karabakh antara Armenia dan Azerbaijan. Kegagalan mediasi OSCE dalam Resolusi Konflik dipengaruhi oleh faktor *relative power, previous relations, internal characteristics, duration, intensity, issues, previous relationship with parties, previous mediation attempts* dan *mediator strategies*.

Sedangkan indikator *mediator identity and rank* tidak berpengaruh terhadap kegagalan mediasi OSCE. Jadi, penelitian ini lebih mengupas penyebab

³ Jodi Misyendi, *Analisis Peran Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) Dalam Mediasi Konflik Nagorno-Karabakh Antara Armenia Dengan Azerbaijan*, JOM FISIP, Vol.8, Edisi II, (2021)

kegagalan dari suatu forum organisasi perdamaian atau kerjasama dalam usahanya menyudahi konflik di antara anggotanya.

Dari ketiga penelitian diatas, Penulis mendapat pemahaman akan latar belakang mengenai sejarah dari konflik yang terjadi di Nagorno-Karabakh antara Armenia dengan Azerbaijan dan juga penulis mendapatkan informasi mengenai usaha apa saja yang telah dilakukan untuk menyelesaikan konflik ini.

Oleh karena itu, dalam penelitian kali ini penulis akan lebih menyempurnakan lagi penelitian-penelitian terdahulu tersebut dengan menggunakan metode dan teori yang relevan dengan konflik di Nagorno-Karabakh, terutama yang terjadi pada tahun 2020. Untuk mempermudah dalam membaca penelitian terdahulu beserta persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini, berikut ini Penulis sajikan dalam bentuk tabel, yaitu :

NO.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Mumin Ahmad Khan	<i>The Conflict of Azerbaijan And Armenia With Special Reference to Nagorno-Karabakh : An Overview</i> ⁴	<p>1. Sejarah dan latar belakang perang yang terjadi antara Armenia dengan Azerbaijan dalam perebutan wilayah Nagorno-Karabakh.</p> <p>2. Keterlibatan negara asing seperti Rusia, Turki dan juga Iran dalam konflik.</p>	Pembahasan mengenai keterlibatan pihak eksternal dalam perang perebutan wilayah Nagorno – Karabakh antara Armenia dengan Azerbaijan	Fokus waktu terjadinya perang

⁴ Mumin Ahmad Khan, *The Conflict of Azerbaijan And Armenia With Special Reference to Nagorno-Karabakh : An Overview*, Journal of Malay Islamic Studies, Vol. 04, No.01,(June 2021)

2.	Shabnam Dadparvar dan Saeed Azizi	<i>Exploring Turkey's Strategic Goals in Caucasus Region During the 2020 Nagorno-Karabakh Crisis</i> ⁵	Penelaahan tujuan strategis Turki di kawasan Kaukasus Selatan berdasarkan krisis Nagorno-Karabakh 2020 dengan mengadopsi pendekatan Realisme.	<p>1. Keterlibatan Turki dalam perang perebutan wilayah Nagorno-Karabakh antara Armenia dengan Azerbaijan pada tahun 2020.</p> <p>2. Teori yang digunakan yaitu Realisme</p>	Fokus permasalahan yang dibahas, yaitu proses terjadinya perang pada tahun 2020 serta pembahasan secara komprehensif mengenai pihak eksternal yang aktif terlibat, bukan hanya Turki.
3.	Jodi Misyendi	Analisis Peran Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) Dalam Mediasi Konflik Nagorno-Karabakh Antara Armenia Dengan Azerbaijan ⁶	Kegagalan <i>Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)</i> dalam menengahi konflik Nagorno-Karabakh antara Armenia dan Azerbaijan dengan menggunakan teori Jacob Bercovitch tentang mempengaruhi perilaku mediasi di konflik internasional sebagai alat analisis.	<p>Keterlibatan OSCE dalam perang perebutan wilayah Nagorno-Karabakh antara Armenia dengan Azerbaijan pada tahun 2020.</p>	<p>1. Permasalahan yang diangkat, yaitu keterlibatan semua pihak eksternal serta dampaknya.</p> <p>2. Teori yang dipakai</p>

⁵ Shabnam Dadparvar dan Saeed Azizi, *Exploring Turkey's Strategic Goals in Caucasus Region During the 2020 Nagorno-Karabakh Crisis*, International Relations and Diplomacy, Vol. 8, No. 11,(November 2020)

⁶ Jodi Misyendi, *Analisis Peran Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) Dalam Mediasi Konflik Nagorno-Karabakh Antara Armenia Dengan Azerbaijan*, JOM FISIP, Vol.8, Edisi II, (2021)

--	--	--	--	--	--

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Teori Realisme Politik

Teori realisme politik seperti yang diungkapkan Morgenthau ialah bahwa "politik adalah perjuangan untuk memperoleh kekuasaan atas manusia, dan apapun tujuan akhirnya kekuasaan adalah tujuan terpentingnya dan cara cara memperoleh, memelihara dan menunjukkan kekuasaan menentukan teknik tindakan politik"⁷.

Asumsi dasar dari realisme yaitu : 1) pandangan pesimis atas sifat manusia; 2) keyakinan bahwa hubungan internasional pada dasarnya konflikual dan bahwa konflik internasional diselesaikan melalui perang; 3) menjunjung tinggi nilai nilai keamanan nasional dan kelangsungan hidup negara; 4) skeptisme dasar bahwa terdapat kemajuan dalam politik internasional seperti yang terjadi dalam kehidupan politik domestik.⁸

Selain itu, Morgenthau sebagai tokoh dari Realisme mengemukakan enam prinsip dari Realisme yaitu : 1) Realisme Politik menganggap bahwa politik, seperti masyarakat umumnya, dikendalikan oleh hukum-hukum objektif yang berakar pada hakikat manusia, 2) politik internasional merupakan wadah suatu negara dalam memenuhi *interest*-nya sebagai tujuan mendapatkan *power*, 3)

⁷ Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional: Teori dan Pendekatan*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2014)

⁸ *Ibid.*

bentuk dan sifat kekuasaan negara akan bermacam-macam (kontekstual) tetapi kepentingan nasional akan tetap sama, 4) prinsip moral universal tidak menuntut sikap negara, 5) tidak ada prinsip moral universal, 6) secara intelektual politik itu otonom.⁹

Para penganut Realisme lebih sering mencari penyebab konflik yang konkret dan khusus, sebagai contoh, argumen-argumen “ekonomi” seperti perang dagang, perbedaan-perbedaan ideologi (nilai-nilai), perbedaan etnis atau agama, bahkan tekanan dari para pemimpin tertentu. Kebanyakan konflik berdarah dalam sejarah saat ini terjadi sehubungan dengan akses terhadap sumber daya.¹⁰

Dalam Teori Realisme Politik, terdapat dua konsep utama yang menjadi unsur penting, yaitu Kepentingan Nasional dan Power. Kepentingan nasional atau dalam ungkapan Prancis yaitu *raison d'État* adalah tujuan dan ambisi negara, baik ekonomi, militer, atau budaya.¹¹ Negara harus tunduk pada kebutuhan khususnya sendiri, yaitu kepentingan nasional. Kepentingan nasional sangat erat kaitannya dengan power negara sebagai tujuan maupun instrumen, khususnya yang bersifat destruktif (hard power). Power menurut definisi Hans J. Morgenthau ialah suatu hubungan antara dua aktor politik dimana aktor A memiliki kemampuan mengendalikan pikiran dan tindakan aktor B.¹² Jadi, menurut Morgenthau Power

⁹ Hans J. Morgenthau, *Politik Antar Bangsa*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010)

¹⁰ Jill Steans dan Lloyd Pettiford, *Hubungan Internasional : Perspektif dan Tema*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009), hal. 68

¹¹ Arry Bainus & Junita Budi Rachman, *Kepentingan Nasional dalam Hubungan Internasional*, INTERMESTIC : Journal of International Studies, Vol. 2, No. 2 (Mei 2018) hal. 109

¹² Mochtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*, (Jakarta : LP3ES, 1990) hal. 136

itu bisa terdiri dari apa saja yang bisa menciptakan dan mempertahankan pengendalian atas pihak lain meliputi semua hubungan sosial yang mendukung pengendalian itu, mulai dari kekerasan fisik sampai cara yang paling halus.¹³

Ketika kepentingan nasional bertujuan untuk mengejar *power* dan *power* dipergunakan sebagai instrumen untuk mencapai kepentingan nasional, maka konsekuensinya dalam sistem internasional yang dipersepsikan anarki—kecuali kekuasaannya sendiri—adalah kompetisi, kemunculan perimbangan kekuasaan, konflik dan perang.¹⁴

Pandangan Realisme Politik dalam melihat latar belakang penyebab terjadinya konflik antar negara sangat relevan dengan penelitian ini. Konflik yang terjadi antara Armenia dengan Azerbaijan memang didasarkan pada perbedaan etnis dan agama yaitu penghuni wilayah Nagorno–Karabakh yang mayoritas adalah etnis Armenia yang beragama Kristen tetapi dikuasai oleh pemerintahan etnis Azeri Muslim. Penguasaan atas wilayah Nagorno–Karabakh adalah keharusan yang mutlak bagi kedua negara.

Bagi Azerbaijan, penguasaan atas wilayah Nagorno–Karabakh menjadi ajang pembuktian bagi negara untuk menjaga integritas dan kedaulatannya karena sudah mereka kuasai selama puluhan tahun sejak Uni Soviet baru berdiri. Sementara bagi Armenia, penguasaan atas wilayah ini menjadi hal yang mutlak karena mayoritas penduduk Nagorno-Karabakh memiliki kesamaan etnis dan agama dengan Armenia dan juga di antara Armenia dengan Nagorno–Karabakh

¹³ Ibid.

¹⁴ Arry Bainus & Junita Budi Rachman, Op. Cit. hal. 110

memiliki sejarah yang sangat panjang sebelum wilayah Nagorno–Karabakh diserahkan pengelolaannya kepada Azerbaijan pada era Soviet.

Selain faktor etnis dan wilayah tersebut, ekonomi tentu juga menjadi faktor utama terjadinya konflik tersebut. Wilayah ini yang diketahui kaya akan sumber daya alam terutama gas bumi serta menjadi wilayah perlintasan pipa gas dan minyak dari Rusia ke Eropa tentunya memicu kedua negara mengerahkan segala kemampuannya untuk menguasai wilayah ini. Faktor ekonomi ini juga yang turut membuat pihak eksternal ikut terlibat dalam konflik ini, seperti Turki dan Rusia. Dalam pandangan Realisme Politik, negara harus bisa mengkonsolidasi *power*-nya agar bisa mencapai kepentingan yang hendak dicapai, dalam hal ini yaitu akses terhadap sumber daya alam.

2.2.2 Manajemen Resolusi Konflik

Konflik sejatinya telah ada sejak permulaan umat manusia di dunia ini. ‘Konflik’, itu sendiri berasal dari kata latin *configere*, memiliki makna dua orang atau kelompok atau lebih yang saling serang, saling menyakiti, bahkan bisa saling menghabisi pihak lawannya.¹⁵ Dalam pandangan sosiologis, Louis Kriesberg mendefinisikan konflik sebagai sebuah situasi dimana dua atau lebih aktor mengejar tujuan-tujuan yang tidak bersesuaian (*incompatible goals*).¹⁶

Sementara, ilmuwan Hubungan Internasional yaitu James Dougherty dan Robert Pfaltzgraff mendefinisikan konflik sebagai suatu kondisi dimana satu

¹⁵ I Nyoman Sudira, *Resolusi Konflik dalam Perubahan Dunia*, Global: Jurnal Politik Internasional, Vol. 19, No. 2(Desember,2017) hlm.156

¹⁶ Umar Suryadi Bakry, *Dasar-Dasar Hubungan Internasional*, (Jakarta :Kencana,2017),hal.68

kelompok manusia (bisa didefinisikan berdasarkan suku, etnik, linguistik, budaya, agama, sosio - ekonomi, politik, atau yang lainnya) melakukan perlawanan secara sadar terhadap satu atau beberapa kelompok lainnya karena kelompok ini dianggap mengejar tujuan-tujuan yang tampak tidak kompatibel.¹⁷

Peter Wallensteen mengidentifikasi tiga bentuk umum dari konflik yaitu:¹⁸

- Inter-states conflicts;
- Internal conflicts;
- State-formation conflicts

Saat terjadi konflik, manajemen konflik (*conflict management*) dan resolusi konflik adalah dua istilah yang sering digunakan secara bersamaan dan bergantian. Manajemen konflik merupakan pendekatan yang berbicara mengenai pengelolaan konflik dengan cara-cara kekerasan atau kompetitif dan non-kekerasan atau kooperatif, selain daripada hanya berbicara tentang bagaimana menangani konflik.¹⁹

Sementara resolusi konflik adalah proses formal atau informal yang digunakan untuk menemukan solusi damai atas perselisihan yang sedang terjadi di antara semua pihak yang terlibat. Manajemen konflik maupun resolusi konflik saling melengkapi satu sama lain.²⁰ Oleh sebab itu, manajemen konflik adalah proses awal dalam memulai usaha mencapai resolusi konflik. Mitchell dan Banks

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid. hal. 69

¹⁹ Penny Kurnia Putri, *Manajemen Konflik dan Resolusi Konflik: Sebuah Pendekatan Terhadap Perdamaian*, Papua Journal of Diplomacy and International Relations, Vol. 2, Issue 1, (Mei 2022), hal. 17

²⁰ Ibid.

(1996) dalam Bama Andika Putra (2021)²¹ menyebut resolusi konflik mengacu pada :

1. Hasil dimana masalah dalam konflik yang ada ditangani dengan memuaskan melalui solusi yang dapat diterima bersama oleh para pihak, mempertahankan diri dalam jangka panjang dan menghasilkan hubungan baru yang positif antara pihak – pihak yang sebelumnya adalah musuh

2. Proses atau prosedur apapun untuk mencapai hasil perdamaian.

Johan Galtung menjelaskan mengenai tiga tahap yang dilalui dalam proses penyelesaian konflik, yaitu:

1. *Peacemaking*, adalah proses yang ditujukan untuk mempertemukan atau merekonsiliasi sikap politik dan strategi dari pihak yang bertikai, terutama pada level elit atau pimpinan melalui mediasi, arbitrase serta negosiasi.

2. *Peacekeeping* adalah intervensi militer yang menjalankan peran sebagai penjaga perdamaian yang netral, sebagai proses untuk menghentikan atau mengurangi tindak kekerasan yang dilakukan pihak yang bertikai.

3. *Peacebuilding* yaitu proses terciptanya perdamaian yang langgeng dengan mengimplementasikan rekonstruksi sosial, ekonomi dan politik.²²

Terdapat berbagai macam pendekatan dalam manajemen resolusi konflik, salah satunya yaitu mediasi. Mediasi menurut Jacob Bercovitch (2009) adalah

²¹ Bama Andika Putra, *Studi Konflik Perdamaian Internasional*, (Sleman : Deepublish Publisher, 2021) hal. 72

²² M. Prakoso Aji & Jerry Indrawan, *Memahami Studi Perdamaian Sebagai Bagian Dari Studi Ilmu Hubungan Internasional*, Jurnal Pertahanan & Bela Negara, Vol. 9, No. 3, (Desember, 2019), hal. 74

salah satu dari proses manajemen konflik, di mana para pihak yang berkonflik mendapat bantuan dari pihak luar untuk mengubah tanggapan atau perilaku mereka terhadap pihak lawan, dan melakukannya tanpa menggunakan kekuatan fisik atau menggunakan hukum.²³ Mediasi sejauh ini adalah bentuk paling umum dari intervensi pihak ketiga yang lebih damai dalam suatu konflik dengan tujuan untuk berkontribusi pada penyelesaian melalui negosiasi.

Salah satu ciri mediasi yang membuatnya berbeda dari jenis intervensi pihak ketiga lainnya ialah mediasi tidak bertujuan menggunakan kekuatan secara langsung untuk kemenangan satu pihak, tetapi memberi para pihak yang berkonflik saluran komunikasi dan informasi, mengubah persepsi negatif pihak-pihak yang berkonflik, memberikan ide-ide yang dapat menghasilkan konsesi, dan membawa para pihak yang berkonflik ke pembicaraan damai dengan tawar-menawar langsung di antara mereka.²⁴ Para aktor yang terlibat dalam mediasi dikategorikan ke dalam tiga kelompok: individu, negara, serta lembaga pemerintah dan nonpemerintah.²⁵

Karena mediasi merupakan mekanisme sukarela dari pihak-pihak yang terlibat dalam manajemen resolusi konflik, mediator yang dipilih harus memainkan perannya dengan maksimal dan memuaskan. Oleh karena itu, mediator setidaknya harus mempunyai sifat atau atribut yang diperlukan untuk meningkatkan kemungkinan berhasilnya mediasi. Menurut Kleiboer (1996)

²³ Namig Abbasov, *Minsk Group Mediation Process: Explaining the Failure of Peace Talks*, *Journal of Caspian Affairs*, Vol.1, No.2, (Summer, 2015), hal. 61

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid. hal 62

atribut penting yang harus ada pada mediator yaitu, ketidakberpihakan, pengaruh dan status.²⁶

Penyelesaian konflik antara Armenia dengan Azerbaijan pada tahun 2020 tidaklah terjadi semata-mata karena kemauan kedua negara. Ada pihak ketiga yang menjadi penengah dalam konflik tersebut yang bertugas mengelola agar skalanya tidak membesar dan pihak yang mencari solusi bagi pihak yang berkonflik dalam proses penyelesaian konflik.

OSCE *Minsk Group* yang dibentuk untuk menangani konflik dan Rusia sebagai “saudara tua” bagi Armenia dan Azerbaijan selama ini dikenal sebagai pemain kunci dalam upaya penyelesaian konflik di antara Armenia dengan Azerbaijan. Peran pihak yang menangani konflik antara Armenia dengan Azerbaijan pada tahun 2020 tampaknya berhasil dengan menggunakan cara – cara non kekerasan atau lebih tepatnya dengan cara perundingan,

2.3 Kerangka Pemikiran

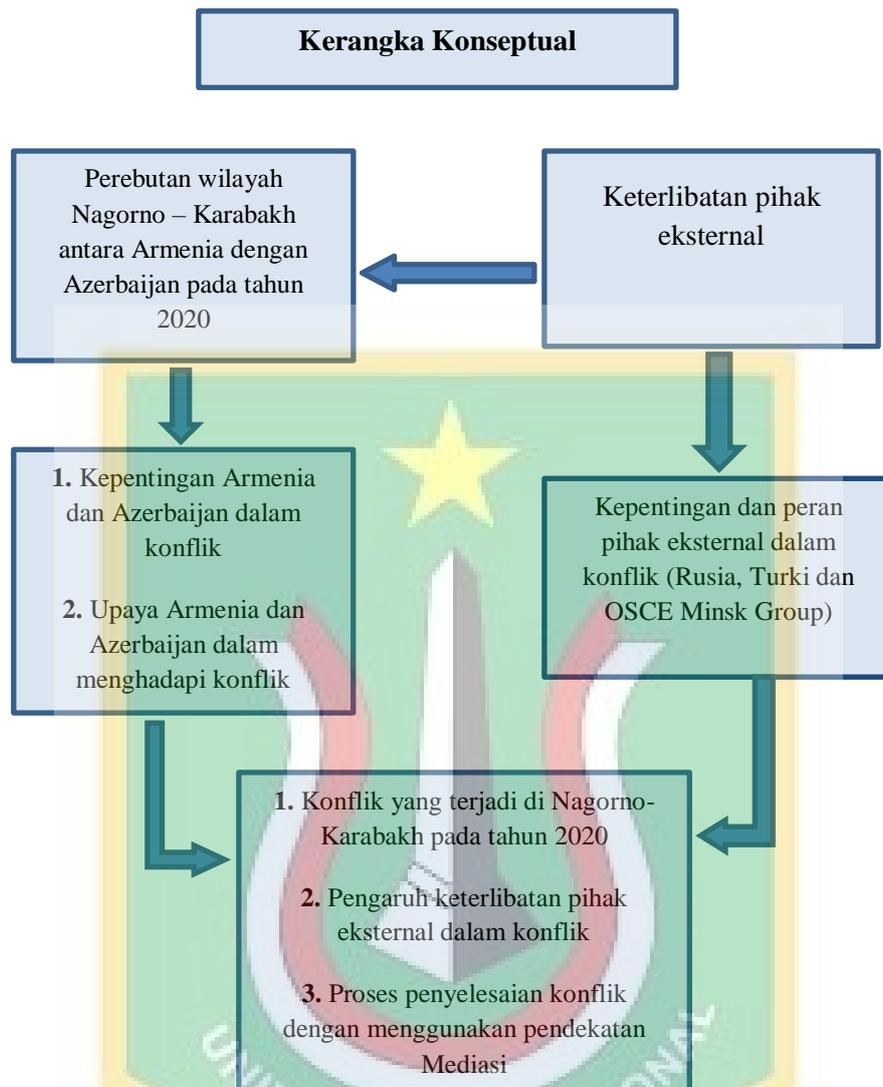
Wilayah Nagorno-Karabakh adalah wilayah yang sangat strategis dan bersejarah di kawasan kaukasus atau bekas pecahan Uni Soviet yang berada di antara Azerbaijan dengan Armenia. Karena posisinya yang strategis dan bersejarah tersebut, Nagorno-Karabakh menjadi wilayah yang rawan akan konflik. Sejarah Nagorno-Karabakh yang memang sudah konflikual sejak awal dicaplok oleh Uni Soviet memuncak setelah Uni Soviet runtuh dan terpecah

²⁶ María Carmelina Londoño Lázaro, *The Effectiveness of International Mediation -The Current Debate*, International Law: Revista Colombiana de Derecho Internacional, No. 2, (Desember, 2003), hal. 321

menjadi banyak negara. Armenia dan Azerbaijan saling mengklaim pengendalian atas wilayah ini.

Secara *de jure* wilayah ini termasuk ke dalam wilayah Azerbaijan, namun secara *de facto* berdasarkan etnis yang menghuninya, wilayah ini dikuasai oleh Armenia. Kedua negara sama-sama mempunyai kepentingan atas wilayah ini. Berbagai upaya dilakukan kedua belah pihak untuk memenangkan perang tersebut

Padahal, sejak awal meletusnya konflik ini hingga tensinya menjadi tinggi, komunitas Internasional telah mengupayakan cara-acara yang terbaik untuk meredakannya. Seperti dibentuknya OSCE *Minsk Group* sebagai forum untuk menemukan solusi atas perselisihan ini. OSCE *Minsk Group* sebagai organisasi internasional yang dibentuk untuk mencari solusi atas konflik di Nagorno-Karabakh telah berusaha mencapai tujuan dibentuknya organisasi, yaitu terciptanya perdamaian abadi di Nagorno-Karabakh. Konflik wilayah Nagorno-Karabakh antara Armenia dengan Azerbaijan ini ternyata juga ikut menyeret negara lain terlibat, terutama Turki dan Rusia. Turki dan Rusia sebagai dua negara dengan kekuatan besar di regional tentunya memiliki kepentingan nasional yang hendak dicapai dalam memainkan peran penting nya masing-masing dalam konflik ini.



Dari bagan kerangka konseptual diatas, terdapat keterkaitan antara konflik yang terjadi antara Armenia dengan Azerbaijan dalam perebutan wilayah Nagorno-Karabakh dengan keterlibatan pihak eksternal dalam konflik tersebut. Dalam perebutan wilayah Nagorno-karabakh tersebut, kedua negara yang berkonfrontasi langsung yaitu Armenia dan Azerbaijan memiliki kepentingan atas wilayah ini serta melakukan berbagai upaya untuk mencapai kepentingannya tersebut. Sementara pihak eksternal yang terlibat dalam konflik ini yaitu: Rusia, Turki dan OSCE Minsk Group. Dari penjelasan tersebut, terdapat tiga hal yang

akan dijelaskan dalam penelitian ini, yaitu : 1) Konflik yang terjadi di Nagorno-Karabakh pada tahun 2020, 2) Pengaruh keterlibatan pihak eksternal dalam konflik, 3) Proses penyelesaian konflik dengan menggunakan pendekatan Mediasi.

